Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Optimalkan Dana Pokok Pikiran untuk Rehab Rumah Warga



 $Sumber \ gambar: \\ \underline{https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/11/dprd-kotabaru-optimalkan-dana-pokran-untuk-rehab-rumah-warga}$

Rustam Efendi, anggota DPRD Kabupaten Kotabaru mengoptimalkan anggaran bersumber dari APBD melalui pokok pikiran atau pokra untuk membantu masyarakat Bumi Saijaan. Salah satu program direalisasikannya melalui pokran, membantu rehab rumah warga tidak mampu di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut politisi partai Gerindra ini, bantuan rehab akan direalisasikan di tahun 2025 nanti, berjumlah ratusan buah.

Tidak hanya di Kecamatan Pulau Laut Utara, namun bersumber dari program serupa juga dialokasikan untuk kecamatan lainnya di kabupaten berada di ujung tenggara Kalsel ini. "Sekarang data yang masuk baru Kecamatan Pulau Laut Utara. Jumlahnya 29 rumah," katanya, kemarin. Rustam menambahkan, akan merealisasikan kegiatan rehab rumah. Sebagai anggota DPRD, tidak hanya menyerap aspirasi. Namun juga mengakomodir dan mewujudkannya. "Masyarakat sangat memerlukan bantuan ini, apalagi mereka tinggal di rumah tidak layak huni," ucapnya. "Mudahan bantuan rehab rumah ini bermanfaat bagi mereka," sambung Rustam.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, H. Rustam Efendi dari fraksi Gerindra, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga kurang mampu. Pada Selasa (6/8/24), Rustam Efendi mengumumkan penyaluran dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk rehabilitasi rumah bagi warga Kecamatan Pulau Laut Utara.

"Rehabilitasi rumah ini sudah saya anggarkan dan pelaksanaannya nanti di tahun 2025. Ada ratusan rumah di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, dan Pulau Sebuku yang memerlukan bantuan, namun saat ini data yang masuk baru 29 rumah di Kecamatan Pulau Laut Utara," ungkap Rustam Efendi.

Pada tahun 2024 ini, Rustam Efendi juga telah menyalurkan berbagai bantuan, termasuk dana rehab rumah dan bantuan lainnya. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, perhatian terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting dan harus diutamakan.

"Semoga bantuan yang saya berikan dapat memberikan manfaat, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi penerima bantuannya," tutup Rustam Efendi.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kondisi tempat tinggal warga kurang mampu dapat lebih layak dan nyaman, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Rustam Efendi berharap bantuan ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sumber Berita

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/11/dprd-kotabaru-optimalkan-dana-pokran-untuk-rehab-rumah-warga, DPRD Kotabaru Optimalkan Dana Pokran untuk Rehab Rumah Warga, (11/08/2024).
- 2. https://sorottipikor.com/2024/08/06/anggota-dprd-kotabaru-salurkan-bantuan-dana-pokir-untuk-rehab-rumah-di-pulau-laut-utara/, Anggota DPRD Kotabaru Salurkan Bantuan Dana Pokir untuk Rehab Rumah di Pulau Laut Utara, (06/08/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana:

- 1) Penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam PeraturanDaerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
- 2) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- 3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- 4) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.